

Dinilai Belum Sentuh Dasar Masalah Pendidikan Gratispol SMA/SMK Dimulai Tahun Ini, Disdikbud Tunggu Regulasi

SAMARINDA – Gratispol yang diusung Rudy Mas'ud dan Seno Aji menjanjikan pendidikan gratis dari SMA hingga S3. Meski terlihat megah, program unggulan gubernur dan wakil gubernur Kaltim itu dianggap belum menyentuh pangkal masalah pendidikan di Kaltim, tentang pemerataan sampai ke pelosok.

"Pendidikan di Kaltim itu masalah mendesaknya soal pemerataan. Masih ada kesenjangan antar daerah," ungkap Sri Murlianti, dosen FISIP Unmul, Senin (30/6). Kesenjangan dalam mengakses pendidikan tak bisa ditakar lewat angka statistik seperti indeks partisipasi pendidikan, ketika sarana-prasarana (sarpras) memang belum merata. Sarpras, tak hanya tentang gedung dan tenaga pendidik, tapi juga soal jarak. Kondisi sarpras di Desa Enggelam, Muara Wis, Kutai Kartanegara, disebutkan bisa jadi potret nyata kesenjangan mengakses pendidikan yang menjadi masalah mendesak yang perlu ditangani.

Di sana, gedung SD terletak di pusat desa. Sementara pemukiman warga terserak di sejumlah dusun dan dukuh, yang jaraknya tak bisa dikatakan dekat. Di Desa Enggelam, anak SD terpaksa merantau, jauh dari orang tuanya, semua agar bisa belajar menulis dan berhitung. Mereka disewakan tempat tinggal di dekat sekolah, sementara keluarga mereka tetap tinggal di dusun atau dukuh.

Ada ongkos hidup yang tak sedikitpun tersentuh janji gratis yang digaungkan pemerintah tersebut. Tingkat ekonomi setiap keluarga, dari anak-anak itu, tak bisa dianggap semua berasal dari keluarga berada. Untuk SMP pun demikian, berlokasi di kecamatan yang jaraknya jelas jauh dari rumah. Alhasil, pola serupa merogoh kocek lebih dalam untuk menyekolahkan anak kembali terjadi.

"Jadi selain urusan biaya sekolah, orang tua harus memikirkan biaya kos anaknya yang masih SD. Bayangkan itu," ujarnya. Hal ini tak hanya terjadi di Kukar, di Kubar juga demikian. Hal ini diketahuinya selepas meneliti kondisi sosial masyarakat di pelosok Kaltim.

Berbicara Kaltim Emas pun dianggapnya sekadar utopis jika tak ada solusi menangani kesenjangan akses di pelosok. Menurut pengajar Studi Sosiatri itu, anak-anak di Kaltim tidak ada yang bodoh. Mereka hanya tertinggal karena tak mampu mengakses pendidikan. "Sebaiknya jangan asal menggaungkan Kaltim Emas ketika belum meratanya akses pendidikan," tukasnya.

Pemprov begitu megah menggaungkan Gratispol tapi program itu disebutkan terlalu elitis karena hanya melihat titik akhir. Statistik lulusan Kaltim yang bisa menembus perguruan tinggi unggulan berasal dari kelompok masyarakat yang tuntas dari permasalahan ekonomi hingga kemudahan dalam mengakses pendidikan. "Masih ada 80 persen warga Kaltim yang SMA saja tak sampai," sebutnya.

Gratispol ke pendidikan tinggi pada akhirnya tak berbeda dengan program beasiswa yang sempat eksis sebelumnya. Program ini masih hanya menyentuh orang-orang yang sanggup berkuliah dengan menysisakan masalah lain. "Sementara biaya hidup saat kuliah apakah dibiayai? Padahal nilainya lima kali lipat dari UKT yang katanya digratiskan," kata Sri mengakhiri.

Pun demikian menurut Koordinator Pokja 30 Buyung Marajo. Gratispol pendidikan tinggi masih menyimpan segudang catatan. Janji kampanye berbasis subsidi perkuliahan itu, disebut hadir menggantikan program-program pendahulunya yang belum tuntas dibersihkan.

Gratispol pendidikan tinggi ini, kata Buyung, tak berbeda dengan pendahulunya. Sebut saja, Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) yang digagas Isran Noor dan Hadi Mulyadi sepanjang 2018-2023. Atau dua periode Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC) milik Awang Faroek Ishak dengan dua wakil yang berbeda, Farid Wadjdy (2008-2013) dan Mukmin Faisal (2013-2018).

"Ini hanya soal merealisasikan janji kepala daerah terpilih menjalankan amanat undang-undang," ungkap Buyung dalam diskusi publik yang digagas BEM FISIP Universitas Mulawarman di Amfiteater Teras Samarinda, Senin (30/6).

Ketiga program ini berangkat janji politik tentang keadilan di sektor pendidikan. Dari hal itu saja, tak ada yang membuat Gratispol lebih istimewa ketimbang dua pendahulunya. Gratispol diklaim menysasar semua mahasiswa, tak seperti dua program terdahulu yang berangkat dari nilai akademik. Tapi hal ini tak menjamin arah pelaksanaannya berasaskan keadilan seperti yang diutarakan pemilik janji.

Di sisi lain, ada yang lebih penting dan mendesak lantaran BKC milik Awang hingga BKT milik Isran punya berputar masalah klasik yang itu-itu saja: bantuan salah alamat. Tak bisa benar-benar memetakan mana yang butuh dan mana yang mampu. "BKC dan BKT menggunakan uang rakyat, tapi tak ada ruang untuk rakyat menilai. Lalu, Gratispol bagaimana," katanya melempar pertanyaan.

Dari dua program yang sempat berjalan, BKC dan BKT, publik tak melihat banyak perubahan di sektor pendidikan yang selama ini kerap jadi janji manis setiap kampanye. Buyung mengingatkan, Gratispol bisa saja tak berbeda dengan pendahulunya jika mekanisme pertanggungjawaban tak transparan sehingga membuktikan penerima manfaat benar-benar yang membutuhkan.

"Jangan sampai program ini justru lebih banyak dinikmati kalangan yang mampu. Anak pejabat teras di Kaltim misalnya. Seperti yang sudah-sudah. Sementara kelompok rentan terabaikan," tuturnya.

Lalu satu hal yang krusial dan perlu digarisbawahi, kata Buyung, jangan sampai pengelola program merupakan wajah lama yang sempat meninggalkan masalah di program terdahulu. Orang-orang yang punya andil menghadirkan kesenjangan dalam pembangunan pendidikan daerah. "Jangan sampai berkubang di lubang masalah yang sama," tukasnya mengakhiri.

Berubah-ubah atau inkonsistensinya informasi terkait pelaksanaan Gratispol pendidikan jadi atensi dalam diskusi publik yang digelar di Amfiteater Teras Samarinda tersebut.

Seperti jumlah perguruan tinggi yang bermitra dengan program itu, sasaran penerima, angka pembiayaan, hingga teknis penyaluran pembayaran uang kuliah tunggal.

Ketua Tim Transisi Rudy-Seno, Rusmadi Wongso, jadi salah satu pembicara dalam diskusi itu. Di awal diskusi, dia menerangkan tim transisi sudah purna tugas, tepat di 100 hari kerja gubernur dan wakil gubernur.

"Tugas kami membantu menyelaraskan ritme pembangunan di 100 hari kerja kepala daerah terpilih. Setelah itu, saya bukan lagi. Jadi hadir di sini sebagai orang yang terlibat dalam penyusunan Gratispol," ungkapnya. Perubahan informasi itu bukan tanpa sebab karena berangkat dari pemugaran data yang terus berkembang dalam penyusunan perencanaan.

Semisal, data siswa yang bakal mendapat gratispol pendidikan SMA sederajat. Data yang dihimpun pastinya berangkat dari data pokok pendidikan yang ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang terus dimutakhirkan per tahunnya.

Itu baru untuk sekolah umum. Untuk sekolah berbasis agama seperti madrasah, Pemprov perlu menilik data dari *Educational Management Information System* (EMIS) milik Kementerian Agama. Sementara di Gratispol Pendidikan Tinggi, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Riset dan Teknologi (Kemdiktisaintek) yang jadi rujukan.

"Nah, data-data itu tentu perlu terus disinkronkan. Jadi wajar kalau terus ada pembaruan," terangnya. Di setiap tahap perencanaan, tim juga sudah menyelipkan mitigasi risiko berkala agar program berjalan lancar dan bisa tepat sasaran ketika diterapkan.

Landasan tata kelolanya pun disiapkan. Dari peraturan gubernur sebagai payung hukum, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai peta jalan pelaksanaan per tahun hingga 2030 mendatang, serta APBD sebagai pijakan penggunaan anggarannya.

Soal informasi yang terserak di sejumlah OPD, hal itu dirasanya tak masalah karena Gratispol yang diusung Gubernur Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji berada di lima instansi sebagai penggerak.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk pendidikan dan seragam gratis untuk siswa SMA. Dinas Kesehatan menghandel jaminan kesehatan gratis dan makan bergizi untuk ibu dan anak. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat soal gratis administrasi kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dinas Komunikasi dan Informasi mengurus *wifi* dan internet gratis di seluruh desa se-Kaltim. Serta Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Provinsi Kaltim yang menangani gratis UKT untuk mahasiswa Kaltim dan perjalanan religi penjaga tempat ibadah. "Mereka penggeraknya, yang paham teknis dan dinamikanya," tutupnya.

Sementara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim bersiap melaksanakan Gratispol untuk SMA/SMK sederajat tahun ini. Mereka tinggal menunggu hadirnya peraturan gubernur (Pergub) sebagai landasan menjalankan janji Gubernur Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji itu.

"Tinggal menunggu Pergub yang masih diasistensi pusat," ungkap Kepala Bidang Pembinaan SMK

Disdikbud Kaltim, Surasa. Soal anggaran yang diperlukan, sasaran penerima program, teknis pelaksanaan, hingga mitigasi jika terjadi pemusatan ulang anggaran sudah beres tersusun dalam perencanaan. Sehingga saat ada permasalahan di fiskal daerah, pemerintah bisa mengantisipasinya.

Pelaksanaan Gratispol di SMA/SMK sederajat nantinya akan menempel pada Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) atau yang dulu dikenal dengan sebutan dana BOS. Pemerintah akan mendongkrak nominal yang diterima setiap sekolah. "Jadi Rp4 juta per siswa. Plus seragam sekolah peserta didik yang juga ditanggung Pemprov nanti," sambungnya.

Tapi ada hal yang digaribawahinya, program ini berjalan bertahap. "Perlu waktu memenuhi semua komponen," imbuhnya.

Kenaikan dana BOSP itu diharapkan bisa mendongkrak banyak hal, dari kualitas guru hingga fasilitas belajar-mengajar. "Bisa pengadaan sumber belajar, bayar tenaga pendidik, atau membeli kebutuhan lain," katanya. **(dwi)**

Sumber berita:

Kaltim Post, Dinilai Belum Sentuh Dasar Masalah Pendidikan Gratispol SMA/SMK Dimulai Tahun Ini, Disdikbud Tunggu Regulasi, 02/07/2025.

Catatan:

1. Dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain diatur sebagai berikut.
 - (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
 - (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
2. Dalam Pasal 1 angka Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dijelaskan bahwa Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan.
3. Dalam Pasal 7 ayat (1) Permendikdasmen 8/2025 diatur bahwa satuan pendidikan penerima Dana BOS meliputi:
 - a. SD;
 - b. SMP;
 - c. SMA;
 - d. SLB; dan
 - e. SMK.

4. Dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi dijelaskan bahwa Program Pendidikan Gratispol adalah beasiswa dan/atau stimulan yang diberikan kepada mahasiswa atau peserta didik asal Kalimantan Timur berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan.